



PROCEEDING WORKSHOP STUDI DIPLOMASI DAN KEAMANAN

27-28 MARET 2009

LABORATORIUM DIPLOMASI UPN "VETERAN"
YOGYAKARTA

WORKSHOP INI DISELENGGARAKAN UNTUK
MENINGKATKAN KOMPETENSI PARA PENGAJAR JURUSAN
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

2009

ISBN: 978-979-18903-1-1

PROCEEDING WORKSHOP

WORKSHOP STUDI DIPLOMASI DAN KEAMANAN

27-28 MARET 2009

**LABORATORIUM DIPLOMASI
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA**

**WORKSHOP INI DISELENGARAKAN UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PARA
PENGAJAR JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA**

2009

**Proceeding ini diterbitkan oleh HI UPN "Veteran" Yogyakarta Press
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta**

Penanggung Jawab:

**Asep Saepudin
(Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,
FISIP, UPN "Veteran" Yogyakarta)**

Editor:

Aryanta Nugraha

Ludiro Madu

Alamat

**HI UPN "Veteran" Yogyakarta Press
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Jl. Babarsari No. 2 Tambak Bayan Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 7852600.**

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Penerbit	ii
Daftar Isi	iii
Kata Pengantar	iv
 Strategi Rusia Dalam Hubungan Kemitraan Strategis Rusia-UE <i>Aryanta Nugraha</i>	 1
• Mediasi Konflik Melalui Konferensi Perdamaian: Dari Perdamaian Negatif ke Positif <i>Ludiro Madu</i>	35
• Diplomasi Sumber Daya China Terhadap Afrika Selatan dalam Menjamin Ketercukupan Energi <i>Iva Rachmawati</i>	47
• <i>Negotiation at Home: Membangun Konsensus Domestik Tentang "Indonesia" Sebagai Merek Domestik</i> <i>Nikolaus Loy</i>	70
Kebijakan Keamanan Jepang: Perspektif Konstruktivisme <i>Fauzan</i>	88
Peran Paradiplomasi dalam Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat <i>Srilssundari</i>	108
• Eco-conflict Dilihat Dari Perspektif Neo-Malthusian, Neo-Klasik Ekonomi dan Political Ecology: Kontribusinya Bagi Kajian Hubungan Internasional. <i>June Cahyaningtyas</i>	133
• Rashtriya Swayamsevak Sang (RSS) dan Ideologi Hindutya <i>Bastian Yunariono</i>	162
• Human Trafficking: Akar Penyebab dan Respons Kebijakan di Tingkat Lokal <i>Nikolaus Loy</i>	182
• Peran Nato Dalam Peace Building di Kosovo: Isu Tata Kelola Keamanan Regional di Eropa <i>Ludiro Madu</i>	209
• Dinamika Operasi Perdamaian PBB Dalam Upaya Penyelesaian Konflik <i>Fauzan</i>	242
The Changing Pattern of Indonesia-Malaysia Relations: How Should Indonesia Respond? <i>Aryanta Nugraha</i>	261

KATA PENGANTAR

Dalam Ilmu Hubungan Internasional (HI), studi-studi diplomasi dan keamanan merupakan topik-topik utama yang memperoleh perhatian besar di kalangan para penstudi HI. Jurusan Ilmu HI, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Yogyakarta telah menempatkan studi-studi diplomasi dan studi-studi keamanan sebagai mata kuliah konsentrasi sejak tahun 2004. Konsentrasi studi ini mendorong pembelajaran HI di UPN "Veteran" Yogyakarta menjadi lebih fokus.

Dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi dan mendorong produk akademik, berupa publikasi ilmiah, yang *tangible*, maka jurusan Ilmu HI UPN "Veteran" Yogyakarta melaksanakan lokakarya ini. Sebagai langkah awal, lokakarya ini disambut baik terbukti dengan banyaknya tulisan ilmiah yang masuk. Tulisan-tulisan dalam *proceeding* ini telah dipresentasikan dalam seminar jurusan HI pada tanggal 28 Maret 2009.

Proceeding ini diharapkan dapat menambah khasanah akademik mengenai studi-studi diplomasi dan kajian keamanan yang relatif masih kurang hingga saat ini. Selain itu, *proceeding* ini diharapkan merangsang minat akademis para pengajar jurusan HI untuk menghasilkan publikasi dalam kajian Diplomasi dan Keamanan. Dalam tataran yang lebih serius, *proceeding* ini diharapkan menjadi embrio bagi penerbitan buku mengenai studi-studi Diplomasi dan Keamanan.

Aryanta Nugraha
Ludiyo Madu
(Editor)

Strategi Rusia Dalam Kemitraan Strategis Rusia-Uni Eropa

Oleh

Aryanta Nugraha

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Email: aryanta.n@gmail.com

Abstrak

Russia-European Union relation has been reaching a level of high misunderstanding and mistrust. It is marked by both sides diverge position on several regional issues such as EU's growing contention on Russian democracy and human rights, different position on Kosovo independence, and several disputes between Russia and EU member countries. The strategic partnership is in crisis since EU became dependence on Russian energy and it is used as a tool of diplomacy bilaterally to split EU's member countries unity. The relations between both also turn into zero-sum game related to common neighborhood countries. Russia looks to gain more and more influence from its previous allies.

This paper tries to describe the downturn pace of Russia-EU relations. It argues that Russian foreign policy's revision that expressed her self as self assured great power and has transform Russia into power seeker in a new realist world. Russia pursues its own agenda in the face of EU opposition and increasingly sets the path of the game. The Russia-EU strategic partnership is a test case that Russia has been struggling to change post Cold War power structure, a multipolar world.

Keywords: EU-Russia Relations, Strategic Partnership

Pendahuluan

Secara normatif, sejak runtuhnya Uni Soviet, hubungan Rusia-UE terbangun secara konstruktif melalui berbagai mekanisme bantuan UE untuk mempromosikan ekonomi pasar dan demokratisasi di Rusia. Mekanisme itu selanjutnya ditingkatkan dalam suatu skema kelembagaan yang dikenal sebagai *Partnership and Cooperation Agreement (PCA)* yang berjalan sejak 1997. Melalui mekanisme kelembagaan ini suatu kemitraan strategis antara kedua pihak dibangun. Rusia menjadi sangat kooperatif meskipun UE terus

memperluas keanggotaannya ke arah timur, dan pada saat yang sama arus investasi dan perdagangan kedua pihak meningkat dengan cepat.

Namun seiring dengan semakin menguatnya ekonomi Rusia, dan semakin asertifnya politik luar negeri Rusia, sejak 2004 kemitraan strategis Rusia-UE nampak semakin bergerak ke arah yang berlawanan dan paradoksal. Arus ekonomi UE ke Rusia semakin meningkat, demikian pula kritik UE terhadap pelaksanaan demokrasi dan HAM Rusia juga semakin menguat. Pada sisi lain Rusia juga nampak semakin defensif dan berupaya mengembangkan pengaruhnya di negara-negara tetangganya, misalnya dalam kasus pemilihan presiden di Ukraina dan kasus invasi ke Georgia. Bisa dikatakan bahwa hubungan Uni Eropa (UE)-Rusia akhir-akhir memasuki fase stagnasi, depresi, bahkan berada di persimpangan jalan.¹

Hubungan antara Rusia dengan Uni Eropa (UE) akhir-akhir ini mengalami pasang surut dan ditandai dengan silang sengketa opini dan strategi menyangkut kebijakan luar negeri dan keamanan masing-masing pihak. Hal ini diindikasikan oleh berbagai peristiwa yang menyebabkan munculnya *gap* baik secara perseptif maupun substantif dalam beberapa kasus, *pertama*, menyangkut hubungan Rusia dengan negara-negara anggota UE secara bilateral, seperti memburuknya hubungan Rusia dengan Polandia menyangkut kasus larangan impor daging, dengan Estonia menyangkut kasus patung perunggu di kota Tallin. Selain itu Rusia juga sering menggunakan energi sebagai alat penekan secara bilateral terhadap negara-negara anggota UE. *Kedua*, menyangkut perbedaan persepsi berkaitan dengan rencana pengembangan perisai rudal AS yang akan ditempatkan di Polandia dan Ceko. Rusia bahkan menyatakan keluar dari perjanjian CFE (*Conventional Armed*

Forces in Europe) sehingga memicu dilema keamanan di benua Eropa. *Ketiga*, menyangkut penyelesaian kasus Kosovo, dimana Rusia menentang upaya UE dan AS memerdekakan Kosovo sebagai bagian penyelesaian konflik wilayah Balkan.

Tulisan ini akan mendeskripsikan bagaimana hubungan kemitraan strategis antara Rusia dengan UE, dari perspektif strategi Rusia.

Kemitraan Strategis Rusia-Uni Eropa

Hubungan antara Rusia-UE didasarkan pada berbagai dokumen dan kerangka kelembagaan. Dokumen yang paling penting dalam hubungan tersebut adalah *Partnership and Cooperation Agreement (PCA)*, dokumen pernyataan bersama dalam KTT UE-Rusia. Selain itu juga ada dokumen yang dibuat di dalam UE sendiri yaitu *Common Strategy* dan dokumen internal Rusia yang merupakan respons terhadap *Common strategy* yakni *Medium Term Strategy*. Keseluruhan dokumen itu secara formal menunjukkan bahwa kedua belah pihak ingin mengembangkan kemitraan strategis dalam berbagai bidang. Sejak Mei 2005 kedua belah pihak menyepakati *Four Common Spaces* yakni area kerjasama yang meliputi 4 bidang kerja sama

Dalam kerangka PCA ada mekanisme kelembagaan seperti: KTT UE-Rusia (2 kali setahun), *Permanent Partnership Council* (pertemuan tingkat menteri), *Cooperation Committee* (Pejabat tingkat senior), dan *Subcommitte*. Selain kerangka kelembagaan ini masih ada dialog politik dalam setiap pertemuan kelembagaan untuk membicarakan berbagai persoalan konflik dan kerja sama regional dan internasional.² Begitu banyaknya dokumen dan

kerangka kerja ini menunjukkan betapa rumit dan kompleksnya hubungan kemitraan strategis antara Rusia dengan UE.

PCA dan *Four Common Spaces*

Akhir 1980an dua fenomena terjadi secara paralel di Eropa. Negara-negara eks-komunis Eropa Tengah dan Timur sedang menjalani perubahan rezim politik dan negara-negara eks Uni Soviet menjadi negara merdeka baru. Pada saat yang sama UE menjalani transformasi secara cepat dari uni ekonomi menjadi uni politik melalui kesepakatan Maastricht 1992.³

Kemitraan strategis Rusia-UE lebih dipengaruhi oleh pertimbangan perubahan geopolitik. Saat itu UE mengembangkan strategi-strategi baru merespons perubahan-perubahan politik pasca Perang Dingin. UE memiliki respons ganda terhadap perubahan-perubahan di negara eks-komunis. Pada fase awal setelah runtuhnya Uni Soviet, kebijakan UE diformulasikan atas dasar pemilahan secara konseptual negara-negara eks-komunis. UE memisahkan kategori negara eks komunis dua kategori: negara calon kandidat UE dalam jangka dekat dan Rusia serta negara-negara eks Uni Soviet, yang dianggap tidak prospektus menjadi negara anggota UE dalam jangka dekat. Oleh karena itu UE membangun dua model kebijakan yang berbeda dalam zona yang terpilah tersebut yakni bantuan dan integrasi bagi kelompok pertama dan bantuan dan kerjasama bagi kelompok kedua.

Dalam konteks bantuan, UE menguncurkan bantuan teknis bagi promosi ekonomi pasar dan demokrasi di Polandia dan Hungaria dalam skema PHARE (*Poland and Hungary Aids for Reconstruction and Economies*) sejak 1989. Skema ini kemudian juga diberikan kepada negara-negara Eropa Tengah dan

Timur yang lain yakni Ceko, Slowakia, Rumania dan Bulgaria dan kemudian ditambah tiga negara Baltik (Estonia, Latvia, Lithuania) dan satu negara eks Yugoslavia (Slovenia). Sedangkan bagi negara-negara eks Uni Soviet kecuali Baltik atau yang tergabung dalam *Commonwealth of Independence States* (CIS),⁴ UE meluncurkan program TACIS (*Technical Aids for Commonwealth of Independent States*).

Sejak awal pandangan UE terhadap negara-negara eks-komunis juga cenderung bercabang dua. Dalam pandangan UE, kedekatan geografis dengan negara-negara Eropa Tengah dan Timur lebih berpotensi untuk menjadi anggota UE karena dianggap lebih tergantung sehingga akan patuh kepada syarat-syarat reformasi dari UE, dan pada saat yang sama tuntutan domestik bagi demokratisasi dan reformasi ekonomi pasar di wilayah itu juga cenderung lebih kuat. Sebaliknya negara-negara CIS, meskipun dianggap vital bagi kepentingan ekonomi dan keamanan UE tetapi prospek keanggotaannya masih sangat jauh atau bahkan tidak terbayangkan. Sikap mendua ini mempengaruhi berbagai kebijakan UE yang ditujukan terhadap negara-negara eks-komunis, misalnya terlihat dari besaran komitmen pendanaan PHARE sebesar dua kali lipat TACIS, yang lebih banyak diarahkan kepada Rusia dan Ukraina.⁵

Sikap bercabang UE juga terefleksi dalam kelembagaan menyangkut hubungan eksternal dengan negara-negara eks komunis. Hubungan antara UE dengan negara-negara eks komunis di Eropa Timur dan Tengah diikat dalam *European Agreement* (EA) dalam kurun waktu antara 1991-1996, yang juga dimaksudkan sebagai langkah awal proses akses ke dalam UE. Kesepakatan ini merupakan upaya UE untuk menanamkan nilai-nilai Eropa seperti reformasi struktural dan liberalisasi ekonomi pasar, demokrasi dan penghormatan

terhadap HAM. Nilai-nilai itu merupakan prasyarat dasar untuk menjadi anggota UE (syarat Kopenhagen 1993). Sedangkan hubungan antara UE dengan CIS diikat dalam skema *Partnership and Cooperation Agreement* (PCA) yang diluncurkan oleh UE sejak 1992. Skema ini merupakan skema pengganti hubungan kerja sama UE-Uni Soviet yang dikenal sebagai *EU Trade and Cooperation Agreement* pada tahun 1989. Skema PCA adalah skema bilateral UE dengan negara-negara eks Uni Soviet yang merupakan langkah UE untuk memberikan prioritas dagang dan memberi status *Most Favoured Nation* negara-negara tersebut. Hal ini disadari karena fungsi vital negara-negara tersebut dalam perekonomian dan keamanan Eropa, namun tidak diharapkan menjadi anggota UE dalam waktu dekat.

Kesepakatan PCA Rusia-UE baru berjalan sejak 1 Desember 1997, karena ada keengganan negara-negara anggota UE menandatangani kesepakatan ini menyusul perang di Chechnya. PCA ini berlaku selama 10 tahun dan bisa diperpanjang secara apabila kedua belah pihak tidak mengajukan keberatan. PCA menghasilkan jaringan politik dan ikatan resmi yang sangat penting bagi Rusia dan UE.

Dalam KTT ke 11 di St Peterburg 2003, Rusia dan UE menyepakati *Four Common Spaces* sebagai bentuk area kerja sama baru yang lebih detil. *Four Common Spaces* ini meliputi; ruang bersama dalam bidang ekonomi, ruang bersama dalam bidang kebebasan, keamanan dan keadilan, ruang bersama dalam bidang keamanan eksternal, dan ruang bersama dalam bidang penelitian, pendidikan dan budaya. Kesepakatan *Four Common Spaces* dianggap sebagai pendekatan yang lebih sistemik, realistik dan lebih detil dalam membangun hubungan dalam berbagai sektor dan dimensi.⁶

Kesepakatan mengenai empat ruang bersama ini dari sudut pandang UE merupakan langkah persiapan bagi UE yang pada saat itu hendak merekrut 15 negara Eropa Tengah dan Timur. UE menyadari ada banyak tantangan yang akan muncul menyangkut kedekatan geografis dengan negara-negara eks komunis, sehingga UE membutuhkan mekanisme untuk mengatasi problematika kedekatan geografis dengan pihak eksternal yang berbatasan langsung dengan UE pasca perluasan. Sebelumnya UE telah mengembangkan kebijakan *European Neighbourhood and Partnership (ENP)*,⁷ yang akan mendukung kerjasama lintas batas, regional dan transnasional negara-negara-negara tetangga pasca perluasan. Bagi Rusia kesepakatan kebijakan ENP akan merugikan karena akan menghambat kerja samanya dengan negara-negara CIS lainnya. Karena keberatan Rusia ini maka ikatan hubungan UE-Rusia tetap dalam skema PCA yang meliputi empat ruang kesepakatan atau yang disebut dengan *Four Common Spaces*.

Secara umum, hubungan Rusia-UE dalam skema *PCA-Four common spaces*, bidang ekonomi, investasi dan industri mengalami perkembangan pesat, namun menyangkut kerja sama dalam bidang kebebasan, demokrasi, keadilan dan kerja sama keamanan eksternal tidak mengalami perkembangan berarti. UE berharap dengan kesepakatan ini akan mampu mempersuasi Rusia untuk mengadopsi model Eropa, yakni kerja sama dalam berbagai bidang yang didasarkan pada transparansi, kerangka legal bersama, consensus dan interferensi timbal balik dalam setiap urusan internal masing-masing. Sebagai pendalaman dari kesepakatan PCA, *Four Common Spaces* ini tidak menawarkan integrasi kepada Rusia. Tujuan utamanya adalah untuk terus

mengikat Rusia dalam jaringan kontak yang ketat melalui berbagai skema kelembagaan dan kerangka kerja yang ada di dalam PCA.

Strategi Rusia menghadapi UE

Ada beberapa perubahan-perubahan strategi yang terjadi di Rusia yang mempengaruhi hubungan kemitraan strategis dengan UE. Perubahan itu meliputi revisi politik luar negeri Rusia; perubahan kebijakan Rusia terhadap negara-negara eks Uni Soviet dan; strategi bilateralisme Rusia terhadap negara-negara anggota UE.

Revisi Politik Luar Negeri Rusia

Sejak Vladimir Putin berkuasa, era *trouble times* dalam politik luar negeri Rusia secara bertahap berhasil diatasi. Putin memprioritaskan konsolidasi domestik sebelum akhirnya Rusia kembali mengambil peran historisnya sebagai kekuatan penting dalam politik internasional. Konsolidasi strategi itu nampak jelas dalam dokumen kebijakan luar negeri Rusia yang dirumuskan oleh dewan keamanan nasional, pada 10 Januari 2000. Dalam doktrin kebijakan luar negeri tersebut dinyatakan bahwa kepentingan utama Rusia adalah:

*"To ensure reliable security of the country, to preserve and strengthen its sovereignty and territorial integrity, to achieve firm and prestigious position in the world community, most fully consistent with interest of the Russian federation as a great power, as one of the most influential centers of the modern world, and which are necessary for the growth of its political, economic, intellectual and spiritual potential."*⁸

Pernyataan mengenai kepentingan itu paralel dengan tujuan berikutnya yakni

"mempengaruhi proses dunia dengan tujuan membentuk tatanan dunia yang stabil, adil dan demokratik yang dibangun di atas prinsip hukum internasional termasuk tujuan dan prinsip piagam PBB berdasar pada hubungan yang setara dan bersahabat diantara negara-negara."

Istilah-istilah *great power*, *prestigious in world community*, dan *partnership among states*, menunjukkan karakter kepentingan nasional Rusia bersifat geopolitik. Kepentingan tersebut sangat dipengaruhi oleh asumsi ideologi bahwa dunia pasca perang dingin dicirikan oleh peningkatan secara substansial kekuatan ekonomi dan politik sejumlah negara dan penyatuan berbagai kekuatan dalam suatu mekanisme internasional yang kompleks. Pada sisi lain ada upaya mengembangkan struktur internasional yang didominasi oleh negara maju yang dipimpin oleh AS yang mampu bertindak secara unilateral yang mampu memanfaatkan kekuatan militer sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai persoalan di dunia. Oleh karena itu posisi Rusia terancam oleh upaya pembentukan tatanan dunia yang tidak melibatkan Rusia.⁹ Dengan pemahaman geopolitik seperti inilah semangat dari kebijakan luar negeri Rusia dibangun.

Dalam pandangan Rusia, Barat telah dua dekade pasca Perang Dingin menentukan pola-pola hubungan antara Barat-Rusia. Rusia merasa diabaikan ketika NATO dan UE terus menerus memperluas keanggotaannya ke wilayah timur. Apalagi ketika aspirasi Rusia tidak diperhatikan oleh NATO dalam kasus serangan udara NATO ke Serbia tahun 1999. Rusia juga merasa dikhianati ketika AS secara unilateral mencabut komitmennya dalam perjanjian ABM 1972¹⁰ karena AS ingin mengembangkan persenjataan anti-rudal di wilayah AS dan Eropa. Selain itu Rusia juga merasa di tikam dari belakang ketika AS terus membangun pangkalan-pangkalan militer baru di Eropa bahkan di Asia Tengah. Pada masa sebelumnya Rusia terpaksa harus menerima situasi seperti itu karena kondisinya yang lemah dan berada dalam posisi yang kalah dalam Perang Dingin.

Saat ini Rusia politik luar negeri Rusia mencoba melakukan revisi ulang penataan politik internasional pasca Perang Dingin. ambisi Rusia untuk menjadi *great power* dan membentuk dunia yang multipolar, seperti yang dinyatakan dalam dokumen politik luar negeri 2000, merupakan penegasan sikap bahwa Rusia tidak ingin menjadi bagian dari Barat, dan Rusia ingin merubah aturan main, pola dan tatanan hubungan antara Rusia-Barat yang diarsiteki oleh Barat di akhir era 90-an. Beberapa bentuk revisi kebijakan luar negeri tersebut nampak dalam bidang keamanan militer, bidang ekonomi, dan aspek diplomasi.

Dalam aspek militer selama ini Rusia merasa kecewa dengan sikap Barat menyangkut beberapa kasus seperti; perluasan NATO, pengembangan senjata anti-rudal di Polandia dan Ceko dan kasus penempatan pangkalan militer AS di Uzbekistan dan Kyrgiztan. Seiring dengan semakin menguatanya kondisi internal, dalam ranah militer Rusia mulai menunjukkan sikap yang menentang Barat, seperti yang ditunjukkannya dalam upaya untuk menegosiasikan ulang perjanjian CFE, mengabaikan kesepakatan KTT OSCE di Istambul, Turki untuk segera mencabut mundur pasukannya yang ada di Georgia dan Moldova sampai dengan tahun 2002.

Untuk terus menjadi *great power* dan membentuk dunia yang multipolar Rusia harus terus didukung oleh kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, Rusia mulai menekan perusahaan-perusahaan minyak yang berasal dari Eropa seperti Shell dan British Petroleum untuk mengurangi kepemilikannya pada ladang minyak Sakhalin II dan Kovyktha untuk dimiliki Gazprom. Pada tahun 2006 Gazprom juga menekan Bulgaria untuk menegosiasikan ulang kontrak penyediaan gas yang mestinya berakhir 2010. Rusia juga menginterupsi suplai gas ke Ukraina, Moldova dan Jerman, berkaitan dengan upaya Rusia untuk

merenegosiasi ulang kontrak penyediaan gas yang sudah diambil pada masa sebelumnya.¹¹ Upaya Rusia untuk merevisi kontrak penyediaan gas terhadap negara-negara anggota UE ini sangat jelas menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kemitraan strategis. Apalagi Rusia juga menerapkan diskriminasi harga tarif rel kereta terhadap negara-negara Baltik dan *export duties* pada komoditas kayu, yang sebelumnya telah dinegosiasikan dengan UE terkait dengan upaya Rusia masuk ke dalam keanggotaan WTO.

Dalam ranah diplomasi, beberapa insiden diplomatik terjadi antara Rusia dengan beberapa negara anggota UE. Rusia diduga kuat mensponsori sebuah organisasi pemuda "*Nashi*" untuk melakukan gangguan terhadap kedutaan besar Inggris, Estonia dan Swedia yang ada di Rusia. beberapa tindakan yang dilakukan oleh *Nashi* misalnya adalah menguntit mobil duta besar, menghalangi, melakukan pemotretan dan mengintimidasi duta besar dan keluarganya. Tindakan-tindakan ini baru berakhir setelah ada inisiatif dari seluruh negara anggota UE dan pertemuan antara menteri luar negeri Sergey Lavrov dengan pemimpin *Nashi*.¹²

Hasil dari revisi politik luar negeri tersebut adalah politik luar negeri yang semakin asertif dan berani bersuara keras dalam berbagai fora internasional. Dalam hal demokrasi dan HAM misalnya, UE tidak hanya sulit menekan Rusia yang mengabaikan norma-norma global, sebaliknya perilaku Rusia mulai mengancam UE, mengingat proyek penyatuan Eropa merupakan upaya yang berbasis norma legal. Rusia terus menonjolkan *power politics* dan cenderung memanfaatkan aturan legal sebagai alat dan selalu berupaya menghindar dari jerat tekanan negara-negara lain.

Tekanan Rusia Terhadap Negara-Negara Tetangga

Hubungan segitiga antara Rusia dengan UE menyangkut negara-negara tetangga bersama (*common neighbourhood*) berubah menjadi hubungan persaingan yang saling mengalahkan (*zero sum game*). Menyangkut negara-negara bekas Uni Soviet ini, UE berupaya menanamkan pengaruh nilai-nilai Eropa (demokrasi, ekonomi liberal dan HAM), melalui berbagai bantuan teknis dan program. Namun semakin terlihat bahwa Rusia berupaya mengembangkan kebijakan yang mencoba meng-*kounter* langkah-langkah UE.

Contoh yang paling jelas adalah sikap Rusia dalam merespons "revolusi berwarna" yang terjadi di Georgia dan Ukraina pada kurun waktu 2003 dan 2004. Rusia merasa bahwa pengaruh mereka terhadap *Near Abroad* ¹³ sudah memudar. Dalam pandangan Rusia, faktor dibalik itu adalah pengaruh UE, sehingga Rusia harus bersaing dengan UE untuk berebut pengaruh di *Near Abroad*.

Rusia mencurahkan banyak sumber daya politik, ekonomi bahkan militer untuk mempengaruhi negara tetangganya. Dalam hal ini Rusia memang memiliki "kue" untuk tetangganya yakni penyediaan energi yang murah, pasar tenaga kerja, pasar produk ekspor, kemudahan visa, sampai dengan perlindungan pada forum-forum internasional. Bahkan untuk beberapa kelompok *secessionist* seperti Abkhazia, Ossetia Selatan (di Georgia) dan Transnistria (di Moldova), Rusia memberi kemudahan visa, kewarganegaraan bahkan pensiun. Di samping itu Rusia juga memiliki "pemukul" yang tidak kalah keras seperti; blokade ekonomi, kenaikan harga gas secara tiba-tiba, pengambilalihan infrastruktur warisan Soviet, dukungan terhadap separatist, dan tekanan-tekanan militer untuk memperoleh apa yang mereka inginkan.

Terhadap negara-negara tetangga, Rusia sering memanfaatkan tekanan-tekanan politik dan ekonomi, melalui media massa, kelompok-kelompok kepentingan yang didukung Rusia dan melalui partai politik. Pada kasus pemilihan Presiden Ukraina, Viktor Yuschenco pernah mendapat terror personal dalam proses pemilihan. Setelah menjadi Presiden, Yushenko terpaksa harus menerima jalur distribusi minyak, gas dan infrastruktur listrik milik Gazprom melalui perusahaan RosUkrEnergo. Ditambah lagi perpecahan warga Ukraina ke dalam dua kubu, barat dan timur dalam menyikapi berbagai persoalan domestik dan luar negeri, adalah akibat dari pendekatan dan tekanan Rusia.¹⁴ kasus yang hampir sama juga terjadi di Moldova, Armenia dan Belarus yang "terpaksa" harus mendekatkan diri kembali dengan Rusia, ketika Kremlin semakin gencar mengancam akan mengambil alih infrastruktur energi yang vital. Meski demikian Rusia tidak selalu mendapatkan hasil yang diinginkan. Namun demikian, terhadap Georgia dan Azerbaijan, Rusia gagal melakukan tekanan non-militer, karena kedua negara ini mampu mengatur kebutuhan energi tidak harus tergantung pada Rusia, selain juga mendapat dukungan diplomatik, politik dan ekonomi yang besar dari negara-negara Barat.¹⁵

Selain tekanan politik dan ekonomi, Rusia juga gencar mempromosikan model demokrasinya yang mereka sebut sebagai *Sovereign Democracy* sebuah model demokrasi yang menggabungkan model demokrasi *electoral* dengan kepemimpinan yang sangat kuat. Di negara bekas Uni Soviet, model demokrasi ini direspons sangat baik terutama oleh negara-negara Asia Tengah yang mengalami goncangan kuat dalam perubahan politiknya. Hubungan *rent-seeking* antara elit lokal pasca Soviet dengan elit Rusia mendorong kembali kedekatan Rusia dengan negara-negara tersebut. Kedekatan ini sangat

menguntungkan Rusia, karena Gazprom kemudian menjadi perusahaan yang banyak mendapat konsesi kontrak pengeboran dan transportasi minyak dan gas. Negara-negara Asia Tengah seperti Turkmenistan, Kazakhstan dan Uzbekistan dikenal memiliki cadanganh minyak dan gas yang besar, namun minim infrastruktur transportasi dan permodalan.

Bagi UE situasi itu sangat menyulitkan. Pada satu sisi, model demokrasi *a la* Eropa kini mendapat tandingan, dan ditambah lagi monopoli migas Asia Tengah yang jatuh ke tangan Rusia sangat merugikan suplai minyak dan gas ke Eropa. Misalnya pada Mei 2007, pemerintah Kazakhstan, Turkmenistan dan Uzbekistan menandatangani kesepakatan baru pipa gas gas ke Rusia. Kesepakatan ini mematikan jalur pipa Transkaspia yang menghubungkan gas Asia Tengah ke Eropa. Selain itu Rusia juga menandatangani kontrak jangka panjang dengan Turkmenistan dan Uzbekistan yang memungkinkan Rusia mengontrol gas yang akan di ekspor ke Eropa. Dengan cara-cara seperti ini, Rusia melalui perusahaan Gazprom mampu meningkatkan komitmen ekspor gas ke Eropa, sekaligus mendorong ketergantungan Eropa terhadap gas yang disuplai oleh Rusia.¹⁶

Bilateralisme Rusia

Sebagai negara federasi dengan kontrol kuat pada pemerintah pusat, Rusia merupakan kekuatan diplomasi *unitary*, berbeda dengan UE yang berbasis koordinasi kebijakan dan saling ketergantungan diantara negara-negara anggotanya. Meskipun kekuatan *soft* dan *hard* power Rusia lebih lemah dibandingkan UE secara keseluruhan, namun dalam diplomasi Rusia memiliki kekuatan diplomasi energi untuk melemahkan posisi UE. Rusia sering

mengembangkan strategi bilateralisme baik dalam kesepakatan kerja sama maupun dalam perselisihan dengan negara-negara anggota UE. Hal ini untuk menghindari munculnya solidaritas dan kesatuan sikap dalam suatu *common strategy* UE yang tentu saja akan memperlemah posisi diplomasi Rusia.¹⁷

Dengan beberapa negara anggota UE, Rusia mampu mengembangkan strategi yang memungkinkan Rusia mengambil kendali sikap negara-negara tersebut dalam berbagai keputusan yang akan dibuat di UE, melalui veto atau menggagalkan keputusan EU yang akan menekankan agenda tertentu kepada Rusia. Yunani dan Siprus adalah salah satu negara yang sering melakukan veto terhadap keputusan UE. Salah satu veto yang dilakukan adalah ketika Perwakilan UE untuk wilayah Kaukasus pada tahun 2007 akan menunjuk perwakilan khusus untuk wilayah itu dalam rangka meningkatkan hubungan dengan wilayah Abkhazia dan Osetia Selatan-wilayah yang ingin melepaskan diri dari Georgia. Tidak hanya itu Yunani sering dianggap sebagai pendukung Rusia dalam kepentingannya di Eropa Timur. Sikap Yunani ini didasarkan atas kedekatan kultural (kultur Kristen Ortodoks), kepentingan geopolitik dan energi.¹⁸ Selama bertahun-tahun Rusia mendukung Yunani dan Siprus dengan komitmen menyediakan persenjataan apabila konflik terbuka meletus dengan Turki. Yunani juga menjadi partner penting Rusia dalam pipa Burga-Alexandroupolis, dan berbagai proyek pipa yang mengalir melalui Laut Hitam, Bulgaria dan Yunani menuju Italia.¹⁹

Siprus juga bersikap sama dengan Yunani, salah satunya karena Rusia menawarkan perlindungan melalui mekanisme DK PBB. Rusia merupakan pendukung utama Siprus dalam konflik Siprus Utara, dengan mem-veto resolusi PBB yang mengutuk Siprus karena tidak mentaati rencana perdamaian 2004.²⁰

Apalagi Siprus saat ini merupakan tempat yang nyaman bagi modal Rusia di UE, karena banyak perusahaan besar Rusia memanfaatkan Siprus untuk mendirikan perusahaan *offshore*. Pada tahun 2007 Siprus tercatat merupakan investor ketiga terbesar Rusia (mencapai 14%), setelah Inggris (24%) dan Belanda (20%).²¹ Cyprus juga tercatat bergabung dalam delapan negara UE yang menentang kemungkinan operasi perdamaian di Moldova.²²

Baik Yunani maupun Siprus memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang sangat besar terhadap Rusia sehingga terkadang menempatkannya terhadap Rusia di atas komitmen mereka terhadap UE. Meskipun posisi Yunani dan Siprus cenderung lemah namun dalam beberapa kasus kedua negara ini bisa mem-blok rencana dan keputusan UE.

Kelompok negara yang lebih berpengaruh dalam kebijakan UE terhadap Rusia, adalah Jerman, Prancis, Italia dan Spanyol. Prancis merupakan partner dekat Rusia dalam berposisi terhadap hegemoni AS. Kedekatan politik ini didorong oleh motivasi Prancis untuk memperbaiki posisi internasionalnya. Meskipun hubungan ekonomi Prancis-Rusia tidak terlalu erat, namun keduanya dekat secara politik. Prancis adalah partner dagang ke-9 dan investor ke-6 dengan *share* FDI kurang lebih 5%.²³ Dalam bidang energi Prancis juga tidak terlalu tergantung dengan Rusia, karena Prancis banyak memanfaatkan energi nuklir dari Norwegia dan Aljazair. Perusahaan minyak Total dari Prancis memang memiliki hubungan bisnis dengan Gazprom.

Hubungan Rusia-Jerman sangat unik karena memiliki sejarah yang panjang. Dalam pandangan Rusia, Jerman merupakan pintu gerbang menuju Eropa. Jerman adalah partner dagang yang terbesar Rusia sejak sebelum Perang Dunia I sampai dengan pasca Perang Dingin. Jerman adalah pasar

penting bagi gas Rusia, hampir 42% kebutuhan gas Jerman. Perusahaan-perusahaan Jerman juga merupakan partner penting perusahaan gas Rusia. Bahkan kedua negara juga terlibat dalam pengembangan pipa Nord Stream di bawah laut Baltik. Selama pemerintahan Gerhard Schröder, hubungan kedua kepala negara sangat dekat, dengan lebih dari 20 pertemuan dilaksanakan. Dalam konteks politik luar negeri Jerman dan Rusia juga sering mengambil sikap yang sama. Misalnya Jerman tidak berkomentar terhadap aksi militer Rusia di Chechnya, dan kedua negara bersama dengan Prancis mengambil sikap koalisi anti-perang dalam kasus invasi AS ke Irak.²⁴

Italia merupakan partner dagang ketiga terbesar Rusia, setelah Jerman dan China. Italia juga merupakan importir gas terpenting Rusia dengan pangsa pasar sebesar 32%. Hubungan Putin dengan PM Silvio Berlusconi yang sangat erat, membuat Italia bersikap pasif dalam invasi Rusia ke Chechnya. Bahkan ketika Romano Prodi menjabat PM meskipun hubungan pribadinya dengan Putin tidak terlalu dekat seperti halnya Berlusconi, hubungan perdagangan dan energi kedua negara semakin erat. Perusahaan energi Italia, ENI, bekerja sama dengan Gazprom dalam membangun pipa gas di bawah laut hitam yang sering dikenal sebagai South Stream.²⁵

Hubungan Rusia-Spanyol, meskipun Spanyol tidak terlalu dekat secara ekonomi, karena suplai energi Rusia hanya 13% saja, tetapi ikatan politik kedua negara sangat kuat. Putin sangat menaruh respek terhadap Spanyol sebagai sebuah negara besar.²⁶ Sikap baik Spanyol nampak pada keengganan menuduh Rusia dalam berbagai insiden bersenjata antara Rusia dengan negara tetangganya. Kunjungan Medvedev ke Spanyol baru-baru ini menunjukkan ikatan yang kuat tersebut.

Meski demikian, tidak semua negara anggota UE bersikap bersahabat dengan Rusia. beberapa negara merasa dirugikan dan mendorong agar UE lebih keras menekan Rusia. Negara-negara seperti Austria, Belgia, Bulgaria, Finlandia, Hungaria, Luxemburg, Malta, Slovakia, Slovenia dan Portugal, cenderung bersikap secara pragmatis. Kelompok negara ini lebih banyak mengikuti sikap *mainstream* negara besar lain seperti Jerman dan Prancis. Meskipun kelompok negara ini tidak mendukung kepentingan Rusia terhadap UE, negara-negara ini juga khawatir kepentingan mereka terhadap Rusia akan terhambat. Austria, Belgia, Bulgaria, Hungaria dan Luxemburg, mendapat imbas positif dari kemajuan ekonomi Rusia, dan berharap akan menjadi wilayah yang dilalui pipa gas Rusia.²⁷ Austria dan Finlandia karena kedekatan geografis sangat berkepentingan dalam menjaga kerja sama dengan Rusia, sehingga cenderung menyukai relasi ekonomi dan menghindari isu sensitif. Bulgaria juga merupakan partner penting Rusia karena pipa *South Stream* melalui wilayah ini. Apalagi perusahaan minyak Rusia, LukOil merupakan perusahaan terbesar yang beroperasi di Bulgaria. Sementara itu Hungaria juga ingin mendapatkan konsesi dari Rusia terkait pembangunan pipa *Blue Stream*, sehingga membuat negara ini menjadi kekuatan yang potensial untuk mendukung Rusia dalam diplomasi energi terhadap UE. Secara umum kelompok negara ini bergantung pada energi Rusia. Sementara belum ada kebijakan energi bersama di UE, negara-negara ini tidak punya pilihan lain kecuali bernegosiasi bilateral dengan Rusia.

Sikap tidak bersahabat ditunjukkan oleh Inggris, Belanda, Ceko, Denmark, Rumania, Swedia, dan dua negara Baltik (Latvia, Estonia). Secara umum sikap negara-negara ini pragmatik dan berorientasi kepentingan bisnis,

namun negara-negara ini terus menyuarakan isu HAM dan demokrasi serta berani menentang ketika Rusia melanggar norma-norma diplomasi. Diantara negara-negara ini, hubungan Inggris-Rusia merupakan hubungan yang paling kompleks. Awalnya ikatan yang dibangun PM Tony Blair dengan Putin sangat erat.²⁸ Namun ketika Inggris menolak mengekstradisi Oligarkhi Boris Berezovski, hubungan keduanya memburuk. Insiden diplomatik menyangkut lembaga British Council dan konflik bisnis antara British Petroleum dengan Gazprom semakin memperburuk situasi. Puncaknya adalah kasus pembunuhan Alexander Litvinienko mantan agen rahasia yang beremigrasi ke Inggris, pada November 2006. Oleh karena itu Inggris cenderung mendorong penguatan sikap UE terhadap Rusia dan mengupayakan dukungan untuk itu.

Belanda juga merupakan partner dagang penting Rusia. Belanda tercatat sebagai investor terbesar ketiga dan menjadi tujuan penting ekspor Rusia. Namun Belanda cenderung bersikap keras terhadap isu HAM dan demokrasi, meskipun hal itu tidak terlalu mengganggu hubungan ekonomi kedua negara.²⁹

Hubungan Rusia-Denmark juga memburuk karena Kopenhagen pernah menjadikan tempat untuk menyelenggarakan kongres Chechnya pada tahun 2002. Dengan Ceko, Rusia menentang rencana AS yang ingin mendirikan pangkalan anti-rudal di negara tersebut. Sedangkan dengan tiga negara Baltik, hubungan dengan Rusia sangat kompleks menyangkut isu kewarganegaraan, isu suplai energi dan isu perbatasan yang merupakan residu pasca Uni Soviet.³⁰

Rusia memiliki hubungan yang konfliktual dengan Polandia dan Lituania. Kedua negara ini menuduh Rusia ingin mengobarkan kembali semangat Perang Dingin dengan UE. Oleh karena itu kedua negara ini ingin membangun

sikap UE yang lebih kritis, melalui berbagai cara seperti veto terhadap kesepakatan UE-Rusia yang dirasa merugikan UE. Sejarah panjang pendudukan dan kekhawatiran karena kedekatan geografis, isu Kaliningrad dan isu pemotongan suplai gas menjadi faktor yang membentuk sikap kritis kedua negara ini. Rusia sendiri cenderung bersikap tidak kompromi, misalnya dalam menolak rencana penempatan anti-rudal di Polandia dan menghukum Lithuania dengan memanfaatkan suplai gas.

Apa yang nampak dari uraian di atas adalah kecenderungan Rusia untuk memecah belah kekuatan UE dengan mengembangkan diplomasi secara bilateral dan menawarkan negosiasi *stick and carrot* secara berbeda dengan setiap negara anggota UE. Hal itu sangat dimungkinkan karena ketergantungan energi negara anggota UE yang tidak sama. Selain itu kepentingan ekonomi dan bisnis dari setiap negara anggota yang beragam sangat menguntungkan Rusia untuk menghalangi munculnya sikap bersama (*common strategy*) UE seperti yang diamanatkan oleh CFSP. Situasi ini sangat menguntungkan Rusia, karena Rusia berada dalam posisi yang menentukan ketika UE gagal menjadi satu kekuatan yang terkoordinasi.

Pada sisi lain, beberapa negara anggota UE secara individual berupaya menggunakan institusi UE untuk mengejar kepentingan jangka pendek dari pada harus bertindak secara terkoordinasi dalam kerangka UE. Kekhawatiran akan kelangkaan gas sering mendorong negara-negara anggota UE membayar harga lebih tinggi dan berkompetisi untuk mendapatkan gas. Seperti yang dinyatakan Lilia Shevtsova, seorang peneliti dari Carnegie Moscow Centre,

bahwa politisi dan kaum bisnis dari Eropa tidak hanya menerima aturan main Rusia, tetapi juga menjadi pelobi terhadap birokrat kapitalis Rusia.

Mid-Term Strategy

Salah satu instrumen penting dalam kebijakan luar negeri UE adalah CFSP yang disepakati dalam Traktat Maastricht 1992. CFSP ini bagi UE bertujuan untuk mengembangkan dua instrumen utama: pertama *Common Action*, yakni mekanisme untuk menunjuk utusan khusus atau tim pengamat. Kedua, *Common Standpoint*, yaitu mekanisme yang memfasilitasi koherensi tindakan negara-negara anggota dalam organisasi internasional. Selanjutnya dalam artikel 13 traktat Amsterdam, disepakati mekanisme ketiga dari CFSP yakni *Common Strategy*, yakni mekanisme yang memungkinkan pembentukan penyatuan kebijakan diantara kebijakan luar negeri negara anggota yang akan menjadi *guideline* bagi UE terhadap pihak lain. Berbeda dengan PCA, *Common Strategy* ini bersifat internal dan tidak dinegosiasikan dengan pihak lain. Dengan instrumen seperti ini UE akan bisa mendefinikan dengan jelas tujuan dan kepentingan terkait dengan pihak ketiga, seperti misalnya Rusia. Efek yang diharapkan dari *Common Strategy* ini adalah operasionalisasi wacana kebijakan luar negeri baik secara internal maupun eksternal, sehingga tumpang-tindih kepentingan nasional diselesaikan dengan kebijakan yang konvergen dengan menerima input dari negara anggota dan disetujui secara konsensus.³¹ *Common Strategy* terhadap Rusia pertama kali diadopsi pada Juni 1999 oleh Cologne European Council.

Dalam *Common Strategy* dinyatakan bahwa tujuan utama UE adalah: pertama, mendorong konsolidasi demokrasi dan perbaikan *rule of law* dan

intitusi di Rusia, *kedua*, pengintegrasian Rusia ke dalam ruang ekonomi dan sosial Eropa, *ketiga*, kerja sama dalam memperkuat stabilitas dan keamanan Eropa dan sekitarnya, dan keempat, kerja sama dalam menangani tantangan-tantangan bersama di benua Eropa.³²

Sebagai respons terhadap *Common Strategy*, Rusia menyusun strategi yang disebut sebagai *Medium-Term Strategy* 2000-2010 (MTS) yang berlaku sejak Juni 1999. Dalam MTS Rusia menggarisbawahi pentingnya hubungan antara Rusia dengan UE. Melalui MTS Rusia ingin mengembangkan hubungan dan memperkuat hubungan kemitraan strategis. Namun demikian Rusia tidak menyatakan secara eksplisit mengenai rencana akses dan asosiasi dengan UE. Dalam dokumen itu Rusia menyatakan bahwa posisi Rusia yang terbentang diantara dua benua mengharuskan Rusia untuk memelihara kebebasan untuk menentukan arah politik luar negeri, status dan posisinya dalam organisasi internasional. Dalam dokumen MTS tidak disebutkan mengenai nilai-nilai bersama sebagai basis hubungan. Dengan demikian terjadi kesenjangan nilai, manakala dalam *Common Strategy* UE ingin mendorong dan mempromosikan ekonomi pasar, demokrasi dan *rule of law*, dalam MTS Rusia ingin menunjukkan independensinya sebagai kekuatan dunia dan tidak menghendaki adanya intervensi pihak lain dalam urusan dalam negeri maupun luar negerinya.³³

Hasil Strategi Rusia: Ketergantungan Asimetris Uni Eropa Terhadap Rusia

Awal hubungan Rusia-UE terjadi secara paralel dengan rencana perluasan keanggotaan ke wilayah timur (hal yang sama juga dilakukan oleh NATO). Bagi UE kebijakan ke arah timur adalah untuk mengeksport stabilitas UE ke arah timur. Sejak itu, hubungan ekonomi antara UE dengan Rusia meningkat secara

dramatis. Hampir 80% FDI Rusia berasal dari dan sebaliknya semakin banyak perusahaan Rusia yang berinvestasi di Eropa. Rusia saat ini adalah mitra dagang ketiga terbesar setelah AS dan China dan hampir 50% ekspor Rusia ditujukan ke negara-negara Uni Eropa.³⁴

Dalam bidang energi, statistik hubungan antara Rusia-UE semakin memperjelas pentingnya Rusia bagi UE. Saat ini UE mengimpor hampir 80% kebutuhan minyak dan 45 % gas alam dan angka itu diramalkan akan meningkat menjadi 90 % dan 70% karena negara-negara anggota baru di Eropa Timur sangat tergantung pada energi fosil. Hampir dua pertiga dari keseluruhan impor UE dari Rusia adalah energi. Demikian pula, Rusia mengirim dua pertiga energinya ke UE. Saat ini 44 % gas impor UE berasal dari Rusia dan angka ini berkisar seperempat dari keseluruhan konsumsi UE, sementara itu 30% kebutuhan minyak bumi berasal dari Rusia.³⁵ Situasi seperti ini menempatkan UE dalam relasi saling ketergantungan yang tidak simetris karena keamanan energi UE sangat tergantung kepada Rusia. Selain itu struktur pasar gas UE cenderung monopoli, hanya dikelola oleh satu perusahaan yang ditunjuk negara. Akibatnya UE gagal membuat stok dan harga migas relatif mahal.

Situasi ini sangat mengherankan, mengingat UE sebenarnya unggul dalam kekuatan *hard* dan *soft power*. Ekonomi UE secara keseluruhan 15 kali lebih besar dibandingkan dengan ekonomi Rusia. GDP Rusia hanya sebesar gabungan GDP Belanda dan Belgia.³⁶ Dalam hal populasi, jumlah populasi UE 3 kali lebih besar dibandingkan Rusia. Kalau Rusia memiliki kursi tetap di Dewan Keamanan PBB, UE memiliki dua kursi (Inggris dan Prancis). Dalam hal pengeluaran belanja militer, anggaran total UE 7 kali lebih besar dibandingkan

Rusia. Situasi ini seharusnya membuat UE memiliki kekuatan tawar yang lebih besar dibandingkan Rusia. Namun, ketergantungan energi terhadap Rusia telah membalikkan situasi dan menempatkan Rusia sebagai pemegang kendali hubungan kemitraan strategis tersebut.

Dalam kondisi yang demikian Rusia sering memanfaatkan *energy leverage*-nya untuk menekan negara-negara anggota UE sehingga perselisihan bilateral sering terjadi. Selama periode kepemimpinan Presiden berbagai insiden diplomatik terjadi misalnya pada kasus embargo terhadap buah-buahan dan daging dari Polandia, kasus tekanan diplomatik terhadap Inggris terkait tuduhan terhadap lembaga *British Council* yang dituduh melakukan spionase, blokade dan pengurangan pengiriman migas terhadap Lithuania dan Jerman.

Dalam konteks politik domestik, Rusia juga berhasil menghindari tekanan UE menyangkut pelanggaran HAM dan pelaksanaan demokrasi. Misalnya kasus pelanggaran HAM pada perang di Chechnya, kasus pembebasan sandera teroris di Beslan yang menjatuhkan banyak korban sipil, kasus pembunuhan wartawati Anna Politkovskaya, warga Rusia yang tinggal di Inggris, Alexander Litvinenko dan terbunuhnya oligarki Mikhail Khodorkovski yang diduga kuat merupakan akibat dari konspirasi politik.

Hubungan asimetris dengan UE mempermudah Rusia dalam memperbaiki posisi internasionalnya. Misalnya, dalam konteks militer-geostrategis, Rusia mengajukan moratorium perjanjian *Conventional Forces in Europe* (CFE) yang membatasi proliferasi persenjataan konvensional di Eropa, menolak menarik pasukan dari wilayah Moldova dan Georgia seperti yang sudah disepakati dalam pertemuan di Istanbul 1999 dan menentang inisiatif UE yang mendorong kemerdekaan Kosovo. Tidak hanya itu, Rusia juga

memperlemah peran OSCE (*Organisation for Security and Cooperation in Europe*) dan organisasi subsidiarinya ODIHR (*Office for Democratic Institution and Human Rights*) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan demokrasi dan HAM. Dalam hubungan ekonomi dengan negara lain, Rusia melakukan revisi besar-besaran dalam kontrak kerja dengan perusahaan minyak dari AS dan Eropa, seperti Shell dan British Petroleum, melakukan renegotiasi kontrak dan melakukan swap aset-aset perusahaan asing. Semua itu ditujukan untuk menempatkan Gazprom, perusahaan migas milik negara Rusia sebagai pemegang monopoli eksplorasi dan terutama infrastruktur transportasi migas yang menghubungkan jalur migas dari Rusia ke Eropa. Tindakan-tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap *Energy Charter* yang sudah ditandatangani UE dan Rusia, meski belum diratifikasi hingga sekarang.

Salah satu faktor penyebab munculnya saling ketergantungan asimetris adalah bahwa kemitraan strategis tersebut dibangun dengan perspektif yang berbeda menyangkut nilai-nilai dasar dalam strategi dan tujuan kemitraan. UE memiliki pandangan integrasionis sementara Rusia tetap berpandangan klasik *power politics*. sebagai organisasi regional UE berbasis interdependensi diantara 27 negara anggota, pasar yang sangat teregulasi, dan penghormatan terhadap nilai-nilai bersama, dan prinsip keamanan berdasar rasa saling ketergantungan. Sementara itu Rusia sebagai sebuah negara independen menghendaki kedaulatan penuh atas politik dan ekonomi dan prinsip keamanan yang berdasar atas perimbangan kekuatan. Terlebih lagi norma dasar kerja sama tidak didasarkan pada prinsip *common values* Eropa sehingga terjadi *value gap*.

Akibat dari benturan nilai ini tidak mengherankan kalau Rusia dan UE sering mengambil posisi yang berbeda (*divergen*) dalam beberapa isu, terutama apabila menyangkut persoalan keamanan di Eropa (misalnya soal penatan senjata konvensional, soal Kosovo dan persoalan perluasan NATO), persoalan negara tetangga (*common neighbourhood*, seperti misalnya Ukraina, Georgia, Belarus) dan persoalan yang menyangkut penghormatan terhadap demokrasi dan HAM.

Hubungan antara Rusia-UE juga berubah menjadi situasi *zero sum*, terkait dengan negara-negara eks Uni Soviet (*Post Soviet Space*). Pendekatan integrasionis UE berbenturan dengan logika *power politics* Rusia apabila menyangkut wilayah-wilayah tersebut.³⁷ Masing-masing pihak berusaha mengejar strategi dan kepentingannya. UE melalui kebijakan *European Neighbourhood Policy*³⁸ berupaya mendorong kerja sama melalui promosi ekonomi pasar, demokrasi dan *rule of law*. Sedangkan Rusia memiliki tujuan yang sama yakni mengintegrasikan kembali kekuatan ekonomi dan politik negara-negara CIS, namun dengan cara berbeda. Rusia memanfaatkan strategi *stick and carrot* untuk menarik kembali kedekatan negara-negara CIS. Rusia memiliki banyak *carrot* seperti energi murah, pasar yang terbuka, kemudahan visa dan dukungan diplomatik.³⁹ Namun Rusia juga tidak segan menggunakan *stick* untuk menekan misalnya blokade, menaikkan harga energi, tekanan militer atau mendukung gerakan-gerakan *secessionist*.

Salah satu contoh kasus menarik adalah persaingan antara Rusia dengan UE dalam pemilihan Presiden di Ukraina 2005. Dua kandidat presiden yang bertarung mewakili dua perpektif yang masing-masing didukung oleh UE dan Rusia. Viktor Yanukovich adalah kandidat yang didukung oleh Rusia,

berpandangan pragmatis dalam menyikapi pendulum hubungan atlantis-Rusia. Kandidat lainnya adalah Viktor Yuschenko, didukung UE dan AS, berpandangan bahwa Ukraina harus independen dari Rusia dan berkiprah ke Eropa. Pemilihan presiden itu sendiri berjalan panas dan diliputi berbagai insiden. Masyarakat Ukraina seperti terbelah dalam pola dukungan terhadap kandidat. Warga Ukraina barat mendukung Yuschenko, warga Ukraina timur dan selatan mendukung Yanukovich. Ketika kandidat dukungan UE menang, Rusia kemudian memberi sanksi dengan mengancam menaikkan harga gas terhadap Ukraina yang selama ini dibawah pasar internasional.⁴⁰ Kasus persaingan UE dan Rusia di *Post Soviet Space* juga terjadi di Georgia dan Moldova, terkait dengan beda sikap Rusia dan UE menyangkut gerakan *secessionist* yang terjadi di Georgia dan Moldova.

Dengan situasi seperti yang digambarkan di atas, kemitraan strategis antara UE-Rusia mulai diragukan.⁴¹ Kedekatan geografis, latar belakang sejarah yang panjang dan ketergantungan ekonomi saja ternyata tidak mampu menjadi basis kerja sama yang konstruktif. Ini membuktikan bahwa hubungan kemitraan Rusia-UE lebih banyak menggunakan pertimbangan pragmatis menyangkut untung-rugi dalam saling ketergantungan ekonomi bukan basis kerja sama berdasar nilai seperti demokrasi dan HAM, yang selama ini disyaratkan UE terhadap pihak lain. Akibatnya, kemitraan strategis berubah menjadi saling ketergantungan asimetris, ketika UE semakin lama semakin tergantung pada ekspor Rusia, terutama minyak dan gas. Sebaliknya Rusia yang tidak tergantung pada Eropa, dan semakin mengokohkan peran geostrategis untuk mencapai perimbangan kekuatan dengan Barat. Hubungan *zero-sum* dengan negara-negara tetangga (*common neighbourhood*) adalah

upaya Rusia untuk menarik kembali sekutunya di masa lalu. Bagi Rusia kemitraan dengan UE merupakan sarana untuk mendapatkan pengakuan legitimasi terhadap perubahan-perubahan politik pasca komunis dalam wujud *sovereign democracy*.

Kesimpulan

Sejak awal hubungan yang dibangun antara Rusia-UE telah ada celah yang lebar antara kepentingan ekonomi dan kesenjangan nilai antara kedua belah pihak. Rusia berhasil memanfaatkan energi sebagai *soft power* untuk menekankan kepentingannya terhadap UE maupun negara-negara *Common Neighbourhood*. Meskipun UE memiliki pasar internal yang kuat, tetapi UE memiliki *leverage* politik yang lemah menyangkut ketergantungan energi terhadap Rusia. Hubungan berubah menjadi ketergantungan asimetri, dan semakin kuat Rusia semakin memburuk hubungan Rusia-UE.

Dalam hubungan kontemporer Rusia-UE, bisa dikatakan bukan UE yang berhasil merubah Rusia, tetapi Rusia berhasil mempengaruhi UE. Rusia sering kali tidak hanya memblok tujuan-tujuan UE dalam beberapa wilayah kebijakan, bahkan memecah sikap negara-negara anggota. Bagi UE ancaman dari Rusia terhadap keamanan UE tidak hanya menyangkut keamanan suplai energi, tetapi juga kapasitas Rusia yang mampu membahayakan suatu negara dengan melanggar norma-norma Eropa. Keanggotaan di dalam UE membuat negara-negara anggota harus mentaati norma Eropa sehingga dilarang menggunakan tekanan dan blokade sebagai alat politik luar negeri, seperti yang dijalankan Rusia. Terlebih lagi karena UE bukan negara yang tersentralisasi, kepentingannya tersebar diantara kepentingan negara-negara anggotanya.

Oleh karena itu Rusia bisa berkonsentrasi pada satu atau dua persoalan yang sangat politis, sedangkan UE harus mempertimbangkan berbagai persoalan dalam aneka wilayah kebijakan.

Semenjak Vladimir Putin mampu mendorong konsolidasi internal, sikap politik luar negeri Rusia semakin asertif. Rusia ingin terus menyandang status sebagai *great power*, mendorong multipolarisme dan ingin terus mempertahankan pengaruhnya di wilayah Eurasia. Hubungan Rusia-UE merupakan *test case* menarik bahwa Rusia terus memainkan *power politics* dalam rangka mempertahankan pengaruh di wilayah tersebut. Memburuknya hubungan Rusia-UE juga menunjukkan bahwa Rusia sedang bergerak ke arah yang berbeda dengan dunia Barat, dan ini akan sangat berpengaruh pada pembentukan pola-pola kekuatan dan aliansi dalam politik internasional baru pasca Perang Dingin.

End Note

¹ Gunnar Wiegand "EU-Russia Relations at a Crossroad," *Irish Studies in International Affairs*, Vol.19, 2008.

² Berbagai dialog politik terjadi selama: KTT, Pertemuan PPC, Pertemuan tingkat menteri, pertemuan tingkat direktur politik, pertemuan ahli (dalam berbagai format) dan pertemuan komite politik dan keamanan yang diwakili oleh dubes Rusia di Brusel.

³ Salah satu pilar penting dalam penyatuan politik UE adalah pembentukan *Common Foreign and Security Policy* (CFSP) sebagai lembaga kunci yang bertujuan mengembangkan semangat *intergovernmentalisme* dalam merespons berbagai perubahan lingkungan regional dan global. Secara teoritik tujuan dari CFSP adalah memperkuat integrasi dan konvergensi kebijakan melalui koordinasi yang diharapkan akan menghasilkan dampak yang lebih besar bagi UE. Meskipun hampir bersamaan, namun kesepakatan Maastricht ini didesain untuk mengatasi persoalan internal dalam tubuh Masyarakat Eropa bukan sebagai pengembangan institusional untuk merespons perubahan-perubahan di negara-negara bekas komunis. Periksa Andreas Kintis, "Two Years CFSP: A Review," Paper presented for conference The European Union in International Perspectives, *PSA Conference Proceeding*, 1995.

⁴ CIS adalah bentuk pengelompokan baru yang diusulkan oleh Rusia (Yeltsin), Ukraina (Leonid Kravchuk) dan Belarus (Shuskevitch) menjelang runtuhnya Uni Soviet. Sebelas negara eks Uni Soviet bergabung ke dalam CIS, kecuali negara Baltik (Lithuania, Latvia dan Estonia) dan Georgia yang tidak mau bergabung. Organisasi ini gagal menjadi organisasi efektif yang

mampu mawadahi aspirasi dan menyelesaikan persoalan pasca Soviet. Apalagi kepentingan Rusia yang sangat dominan mebuat Ukraina kemudian keluar dari CIS.

⁵ Pada periode 1990-1999, komitmen UE untuk PHARE sebesar 10,2 miliar Euro dan hanya 4,2 Miliar Euro untuk TACIS. Mengenai hal ini periksa www.europe.eu.int/comm/external_relations/ceeca/figures.pdf. ulasan yang menarik mengani hal ini periksa Hughes, *ibid.* hal 2-3.

⁶ Fraser Cameron & Aaron Matta, "Prospect for EU-Russia Relations," *Electronic Publication of Pan Europe Institute*, www.tse.fi/pei.

⁷ Commission for the European Communities, "Paving the way for a A New Neighbourhood Instrument," www.delrus.ec.europa.eu/en/p_522.htm. diakses 25 februari 2009.

⁸ "The Foreign Policy Concept of The Russian Federation," www.fas.org/nuke/guide/russia/doctrine/econcept.htm

⁹ Jeffrey Mankoff, "Vladimir Putin and The Reemergence of Russia Foreign Policy," *International Security Studies Certificate Paper Series Number 06-02*, Department of History, University of Yale, 2006. Hal 10-11

¹⁰ Perjanjian ABM 1972 adalah kesepakatan Rusia dan AS untuk tidak mengembangkan persenjataan tameng rudal.

¹¹ Mark Leonard & Nico Popescu, "A Power Audit of EU-Russia Relations," *Policy Paper*, European Council on Foreign Relation/ ECFR, November 2007.

¹² *Ibid*, hal 21

¹³ Near abroad adalah sebutan Rusia terhadap negara-negara tetangga bekas Uni Soviet. Rusia memiliki doktrin near abroad yang intinya ingin terus tetap mempertahankan pengaruh kuat di negara-negara tersebut.

¹⁴ Misalnya, dalam kasus aksesi Ukraina ke NATO dan UE, rakyat Ukraina terpecah sikapnya menjadi dua kubu secara geografis, warga Ukraina barat mendukung dan Ukraina timur menolak.

¹⁵ Azerbaijan memiliki sumber energi sendiri, dan Georgia memenuhi kebutuhan energi dari Azerbaijan.

¹⁶ Keith C Smith, "Russia Energy Pressure Fails to Unite Europe," *CSIS, Euro Focus*, Vol 13, No.1 Januari 2007, hal 3-4. http://www.csis.org/index.php?option=com_csis_pubs&task=view&id=3704. Periksa juga Steven Woehrel, *et al*, "Russian Energy Policy Toward Neighboring Countries," *CRS Report for Congress*, March 2008. <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34261.pdf>.

¹⁷ Mark Leonard & Nico Popescu, *op cit*, hal 13

¹⁸ Dr. Constantinos Filis, "Greece's role in Russia's plans for Southeast Europe," Center for Russia and Eurasia Institute International Relations Panteion University. http://www.cere.gr/upload/APOPSEIS_20061003.pdf

¹⁹ Greek Ministry of Foreign Affairs "Greek-Rusia Agreement on South Stream Natural Gas Pipe Line," 30 April 2008. http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/30042008_SB1735.htm, diakses 3 Maret 2009.

²⁰ "Russia Veto for Cyprus," <http://edinburghnews.scotsman.com/reunificationofcyprus/Russia-veto-for-Cyprus.2522344.jp>. diakses 3 Maret 2009

- ²¹ Lúcio Vinhas de Souza, "Foreign investment in Russia," *ECFIN Country Focus* Vol.5 Issue 1, 11-01-2008, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication10969_en.pdf
- ²² Konflik di Moldova adalah konflik territorial antara Transnistria yang menyatakan merdeka dari Moldova, dan mendapat dukungan Rusia. Konflik ini sudah berlangsung sejak 1991 dan sekarnag statusnya adalah frozen conflict. Periksa Olga Savceac, "Transnistria-Moldova Conflict," *ICE Case Studies*, Number 182, May, 2006. <http://www.american.edu/ted/ice/moldova.htm>.
- ²³ Lúcio Vinhas de Souza, *op cit*.
- ²⁴ Periksa Marco Overhaus, Hanns W. Maull and Sebastian Harnisch (eds) "The German - Russian Relations: Trading Democracy for Security and Stability?" *A Quarterly E-Newsletter on German Foreign Policy* Volume 5, Number 12 Trier, Germany, 18 Maret 2004 <http://www.deutsche-aussenpolitik.de>
- ²⁵ "Russia-Italia Economic Ties Strong Ahead of Putin Trip," *Ria Novosti*, 12 Maret 2007.
- ²⁶ "Spain, Russia Intensify Energy Links", *Latin America Herald Tribune*, <http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=328933&CategoryId=12395> diakses 3 maret 2009
- ²⁷ Vladimir Soccor, "Belgium-Gazprom's Next Hub in Europe?", *Eurasia Daily Monitor*, 6 Maret 2007.
- ²⁸ Bahkan Blair diberitakan berkunjung ke Moskow untuk memberi selamat pada Putin ketika terpilih menjadi Presiden.
- ²⁹ Lúcio Vinhas de Souza, *op cit*
- ³⁰ Anton Vurshkanik, "RussiaBaltic Policy; The Song Remain The Same" www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/09_sgb_06_rbp.pdf
- ³¹ James Hughes, "EU Relations with Russia: Partnership or Asymmetric Interdependency," *LSE Research Online* 2006, www.eprints.lse.ac.uk/archives/00000651, hal 4
- ³² Misalnya Pendapat Schutte (2004), Hughes (2007), atau periksa Mara Morini, "Russia and the European Union after the Partnership and Cooperation Agreement (PCA): a period of uncertainty or a new political strategy?", www.foreignpolicy.it/file_adon/morini.doc.
- ³³ Ulasan mengenai hal ini periksa Schutte, *op cit*, hal 17-18.
- ³⁴ Wiegand, *op cit*, hal 12.
- ³⁵ Mengenai ketergantungan energi UE terhadap Rusia periksa, Ariel Cohen, "Europe's Strategic Dependence on Russia Energy, *Backgrounder*, No. 2083, The Heritage Foundation, November 2007.
- ³⁶ Worldbank, "Key Development Data and Statistic," www.worldbank.org.
- ³⁷ Misalnya, Vsevolod Samokhvalov, "Relations in The Russia-Ukraine-EU Triangle: Zero-Sum Game or Not?" *Occasional Paper*, Institute for Security Studies No.68 September 2007.
- ³⁸ *European Neighbourhood Policy* adalah kebijakan UE untuk memelihara persahabatan dalam rangka meningkatkan kemakmuran, stabilitas dan keamanan. ENP ini dijalankan pada tahun 2004 dan mencakup hubungan UE dengan Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Belarus, mesir, Georgia, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Moldova, maroko, Palestina, Syria, Tunisia dan

Ukraina. meski Rusia adalah tetangga, tetapi Rusia tidak termasuk dalam ENP, tetapi PCA dan Four Common Spaces. Periksa http://ec.europa.eu/world/enp/policy_en.htm

³⁹ Nico Popescu, "Russia's Soft Ambitions, *Policy brief* 115, Center for European Policy Studies (CEPS), Oktober 2006.

⁴⁰ Samokhvalov, *op cit*.

⁴¹ Misalnya Wiegand, Morini dan Hughes berpandangan pesimis pada kemitraan strategis ini.

Daftar Pustaka

Cameron, Fraser & Aaron Matta, "Prospect for EU-Russia Relations," *Electronic Publication of Pan Europe Institute*, www.tse.fi/pei.

Cohen, Ariel, "Europe's Strategic Dependence on Russia Energy, *Backgrounder*, No. 2083, The Heritage Foundation, November 2007

Filis, Constantinos, "Greece's role in Russia's plans for Southeast Europe," Center for Russia and Eurasia Institute International Relations Panteion University. http://www.cere.gr/upload/APOPSEIS_20061003.pdf

Hughes, James, "EU Relations with Russia: Partnership or Asymmetric Interdependency," *LSE Research Online* 2006, www.eprints.lse.ac.uk/archives/00000651

Smith, Keith C, "Russia Energy Pressure Fails to Unite Europe," *CSIS, Euro Focus*, Vol 13, No.1 Januari 2007, hal 3-4. http://www.csis.org/index.php?option=com_csis_pubs&task=view&id=370 4.

Kintis, Andreas, "Two Years CFSP: A Review," Paper presented for conference The European Union in International Perspectives, *PSA Conference Proceeding*, 1995. Hal 1020-1025

Leonard, Mark & Nico Popescu, "A Power Audit of EU-Russia Relations," *Policy Paper*, European Council on Foreign Relation/ ECFR, November 2007

Mandelson, Peter, "The EU and Russia: Our Join Political Challenge," Pidato Bologna, 20 April 2007

Mankoff, Jeffrey, "Vladimir Putin and The Reemergence of Russia Foreign Policy," *International Security Studies Certificate Paper Series Number 06-02*, Department of History, University of Yale, 2006.

Morini, Mara, "Russia and the European Union after the Partnership and Cooperation Agreement (PCA): a period of uncertainty or a a new political strategy?" www.foreignpolicy.it/file_adon/morini.doc.

Popescu, Nico," Russia's Soft Ambitions, *Policy brief* 115, Center for European Policy Studies (CEPS), Oktober 2006.

Polikanov, Dmitry," Russia-EU (non)-Cooperation in Conflict Management," *Eurojournal.org*. May 2004.

Savceac, Olga, "Transnistria-Moldova Conflict," *ICE Case Studies*, Number 182, May, 2006. <http://www.american.edu/ted/ice/moldova.htm>.

Schutte, Rolf," EU-Russia Relations: Interest and Values-A European Perspective, *Carnegie Papers Russian and Eurasian program*, No. 54 Desember 2004, Carnegie Endowment for International Peace.

Souza, Lúcio Vinhas de," Foreign investment in Russia," *ECFIN Country Focus* Vol.5 Issue 1, 11-01-2008, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication10969_en.pdf

Wiegand, Gunnar" EU-Russia Relations at a Crossroad," *Irish Studies in International Affairs*, Vol.19, 2008.

Woehrel, Steven, et al, "Russian Energy Policy Toward Neighboring Countries," *CRS Report for Congress*, March 2008. <http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34261.pdf>.

Vurshkanik, Anton," RussiaBaltic Policy; The Song Remain The Same" www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/09_sgb_06_rbp.pdf

Commission for the European Communities,"Paving the way for a A New Neighbourhood Instrument," www.delrus.ec.europa.eu/en/p_522.htm. diakses 25 februari 2009.

Greek Ministry of Foreign Affairs "Greek-Rusia Agreement on South Stream Natural Gas Pipe Line," 30 April 2008. http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/30042008_SB1735.htm, diakses 3 Maret 2009.

Worldbank, "Key Development Data and Statistic," www.worldbank.org.

"Russia-Italia Economic Ties Strong Ahead of Putin Trip," *Ria Novosti*, 12 Maret 2007.

"Spain, Russia Intensify Energy Links", *Latin America HeraldTribune*, <http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=328933&CategoryId=12395> diakses 3 maret 2009

"Russia Veto for Cyprus," <http://edinburghnews.scotsman.com/reunificationofcyprus/Russia-veto-for-Cyprus.2522344.jp>. diakses 3 Maret 2009

"The Foreign Policy Concept of The Russian Federation,"
www.fas.org/nuke/guide/russia/doctrine/econcept.htm

www.europe.eu.int/comm/external_relations/ceeca/figures.pdf

http://ec.europa.eu/world/enp/policy_en.htm

